

## **BAB IV**

### **DISKRIPSI OBYEK, PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek**

##### **2.1.1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik**

###### **2.1.1.1. Sejarah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik atau biasa disingkat DISPARBUD merupakan Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pariwisata dan kebudayaan. DISPARBUD Kabupaten Gresik terletak di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 127, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. DISPARBUD pada awalnya mempunyai nama Dinas Pariwisata, Informasi dan Komunikasi (Disparinkom) yang kemudian pada tahun 2009 dirubah menjadi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora). Perubahan tersebut mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang meleburkan Bidang Infokom ke SKPD lain. Bidang Infokom merupakan perwujudan dari Dinas Penerangan yang pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) satuan kerja tersebut dihapus karena dianggap kurang maksimal. Kemudian terjadi perubahan lagi, yaitu pada tanggal 4 Januari 2017 yang semula Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) berubah menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik (pisah dengan Pemuda dan Olahraga yang berdiri menjadi Dinas sendiri). Hal tersebut seiring dengan perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah mulai dari level kementerian, provinsi, dan kabupaten/ kota di seluruh Indonesia.

###### **2.1.1.2. Visi dan Misi**

Visi:

Terwujudnya Gresik yang agamis, adil, sejahtera dan berkehidupan yang berkualitas.

Misi:

1. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku

masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan symbol Gresik sebagai kota Wali dan kota Santri.

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan.

### **2.1.1.3. Tugas dan Fungsi**

Tugas:

Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pariwisata dan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan.

Fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan di bidang urusan pariwisata dan kebudayaan;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pada di bidang urusan pariwisata dan kebudayaan;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang urusan pariwisata dan kebudayaan;
4. Pengkoordinasian pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pariwisata dan kebudayaan;
5. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang urusan pariwisata dan kebudayaan;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang urusan pariwisata dan kebudayaan;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Terdapat 3 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di DISPARBUD Kabupaten Gresik, yaitu UPT Kawasan Wisata Giri, UPT Kawasan Wisata Malik Ibrahim, dan UPT Kawasan Baawean. Tugas Kepala UPT yaitu membantu Kepala Dinas atau Kepala Badan dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja(satu) atau beberapa

kecamatan. Selain itu, Kepala UPT dinas atau badan juga memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Pelaksanaan koordinasi tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di wilayah kerjanya;
2. penyusunan usulan bahan kebijakan dan perencanaan program dan kegiatan;
3. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di wilayah kerjanya;
4. pelaksanaan pelayanan administrasi teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di wilayah kerjanya;
5. pelaksanaan pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di wilayah kerjanya;
6. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan dan kebijakan teknis teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di wilayah kerjanya;
7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di wilayah kerjanya; dan
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas atau Badan yang membidangi sesuai dengan bidang tugasnya.

Setiap UPT yang ada juga mempunyai tugas dan fungsi masing-masing, yaitu:

#### UPT Kawasan Wisata Giri

Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di bidang teknis operasional pengelolaan kawasan wisata Giri yang meliputi areal pemakaman Sunan Giri, Sunan Prapen, Condro Dipo dan Putri Cempo.

Fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan areal pemakaman Sunan Giri, Sunan Prapen, Condro Dipo dan Putri Cempo;
2. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana areal pemakaman Sunan Giri, Sunan Prapen, Condro Dipo dan Putri Cempo;
3. pelaksanaan pelayanan administrasi, penarikan retribusi pengunjung dan pemanfaatan sarana dan prasarana milik pemerintah yang ada di areal pemakaman Sunan Giri, Sunan Prapen, Condro Dipo dan Putri Cempo;
4. pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan kebersihan areal pemakaman Sunan Giri, Sunan Prapen, Condro Dipo dan Putri Cempo;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan areal pemakaman Sunan Giri, Sunan Prapen, Condro Dipo dan Putri Cempo; dan
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan bidang tugasnya.

UPT Kawasan Wisata Malik Ibrahim

Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengelolaan Kawasan Pariwisata, yang meliputi Makam Sunan Maulana Malik Ibrahim, Makam Puspo Negro, Makam Raden Santri, Makam Siti Fatimah Binti Maimun dan Sarana Wisata Lumpur.

Fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan areal pemakaman Makam Sunan Maulana Malik Ibrahim, Makam Puspo Negro, Makam Raden Santri, Makam Siti Fatimah Binti Maimun dan Sarana Wisata Lumpur;
2. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana areal pemakaman Makam Sunan Maulana Malik

Ibrahim, Makam Puspo Negoro, Makam Raden Santri, Makam Siti Fatimah Binti Maimun dan Sarana Wisata Lumpur;

3. pelaksanaan pelayanan administrasi, penarikan retribusi pengunjung dan pemanfaatan sarana dan prasarana milik pemerintah yang ada di areal Makam Sunan Maulana Malik Ibrahim, Makam Puspo Negoro, Makam Raden Santri, Makam Siti Fatimah Binti Maimun dan Sarana Wisata Lumpur;
4. pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan kebersihan areal pemakaman Makam Sunan Maulana Malik Ibrahim, Makam Puspo Negoro, Makam Raden Santri, Makam Siti Fatimah Binti Maimun dan Sarana Wisata Lumpur;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan areal pemakaman Makam Sunan Maulana Malik Ibrahim, Makam Puspo Negoro, Makam Raden Santri, Makam Siti Fatimah Binti Maimun dan Sarana Wisata Lumpur;
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### UPT Kawasan Wisata Bawean

##### Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengelolaan Kawasan Wisata Bawean.

##### Fungsi:

1. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan kawasan wisata di wilayah Bawean;
2. pelaksanaan rencana pemeliharaan, pengembangan dan pemberdayaan sarana dan prasarana kawasan wisata di wilayah Bawean;
3. pelaksanaan pelayanan administrasi, pemungutan retribusi dan pendataan pengunjung kawasan wisata di wilayah Bawean;
4. pelaksanaan pengelolaan, perawatan dan pemeliharaan kebersihan kawasan wisata di wilayah Bawean;
5. pelaksanaan pengawasan, pengaturan dan penggalian potensi kawasan wisata pada wilayah Bawean;

6. pelaksanaan bimbingan teknis pemandu wisata di wilayah Bawean;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan kawasan wisata Bawean; dan
8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **2.1.1.4. Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari:

1. Kepala dinas.
  - AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, A.P., Msi / Pembina Tk. I (IV/b)
  - NIP. 19740820 199412 1 001
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - DWI INDRAWATI PRASETYANINGTYAS., S.Sn, M.Si / Pembina Tk. I (IV/b)
  - Nip. 19680224 199602 2 001
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
      - SAGI, SE. / Penata Tk.I (III/d)
      - NIP. 19611204 198203 1 007
    2. Subbagian Keuangan;
      - Dra. DRISE ROMBE / Penata TK.I (III/d)
      - Nip.19620910 199803 2 001
    3. Subbagian Program dan Pelaporan.
      - Drs. RONNY A.PANGANDAHENG, M.Pd / Pembina (IV/a)
      - Nip. 19630426 199003 1 004
3. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, terdiri dari:
  - Drs. ACH. SHOBIRON., MM / Pembina (IV/a)
  - Nip. 19671108 199311 1 002
    1. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata;
      - RINI SUMIATI, S.Sos, M.Si. / Pembina (IV/a)
      - Nip. 19760324 199602 2 001
    2. Seksi Pengembangan Pariwisata dan Tata Kelola Destinasi;
      - M. FITHER KUNTAJAYA, S.T. / Penata Tk.I (III/d)
      - Nip. 19780618 200801 1 005

Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari;

- SRI HARINI, S.H., M.Kn. / Pembina (IV/a)
- Nip. 19660804 199303 2 006
- 1. Seksi Sarana dan Informasi Pariwisata;
  - KOESRI HADIPRIYONO, S.T., M.M. / Pembina (IV/a)
  - NIP. 19691207 199703 1 003
- 2. Seksi Pendataan dan Pengembangan Pasar Pariwisata
  - R.R. NOENOENG MARINI, S.E / Penata Tk.I (III/d)
  - Nip.19670511 199003 2 008
- 3. Seksi Promosi dan Kerjasama;
  - SAYYIDATUL FAKHRIYAH, S.A.P. / Penata (III/c)
  - Nip.19820215 200901 2 005

Bidang Kebudayaan, terdiri dari:

- MUDI RAHAYU, S.Sos., M.Si / Pembina (IV/a)
- NIP. 19690414 199203 2 010
- 1. Seksi Pelestarian Budaya dan Nilai Tradisi
  - LILIK SRIHARIATI, SE / Penata Tk. I (III/d)
  - Nip. 19630820 198602 2 005
- 2. Seksi Kesenian;
  - SITI MUSRIFAH, S.E / Penata (III/c)
  - NIP. 19710223 201001 2 001
- 3. Seksi Sejarah dan Purbakala;
  - KHAIRIL ANWAR, S.S / Penata Tk.I (III/d)
  - NIP. 19730219 200801 1 005

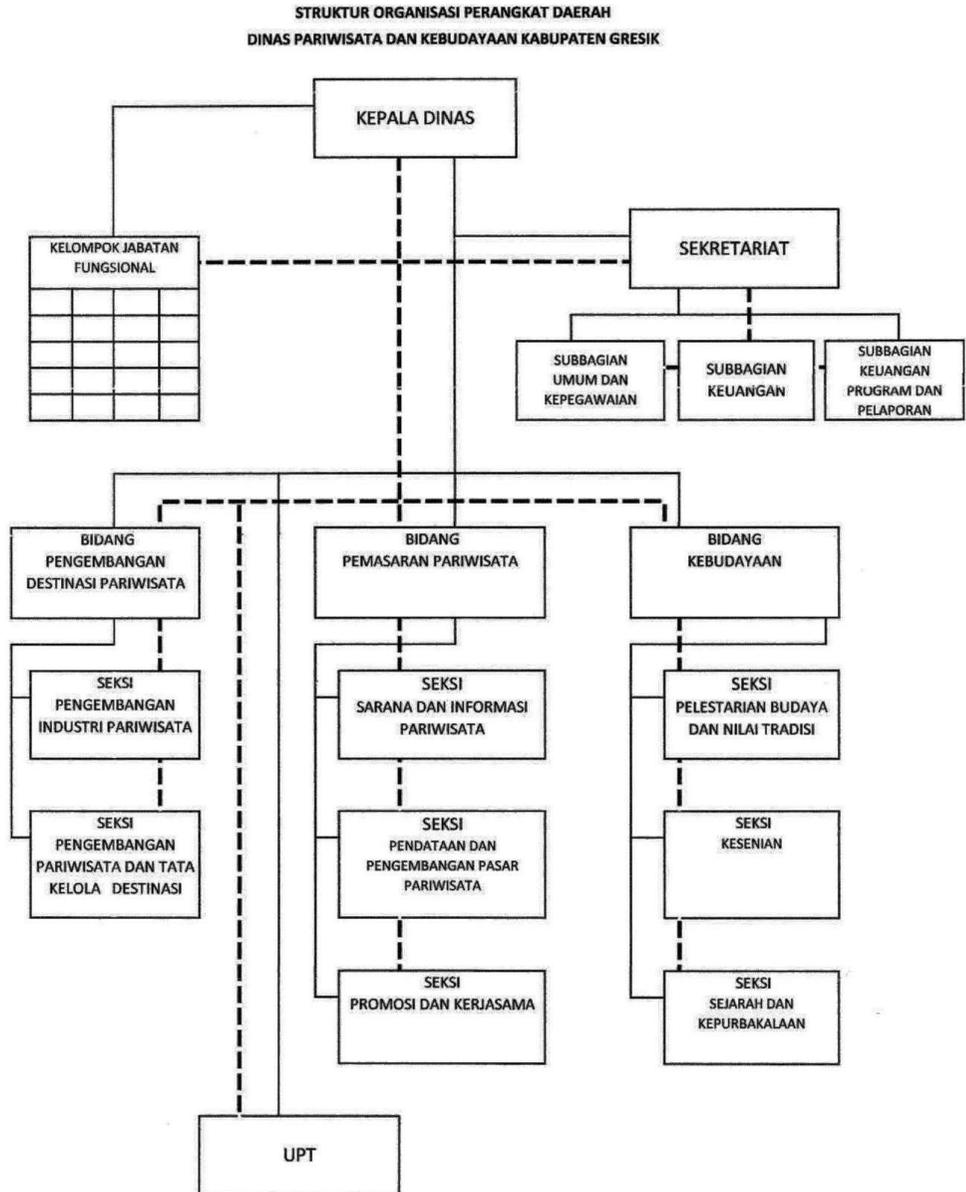
Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :

1. UPT. Kawasan Wisata Giri;
  - 
  - NIP.
2. UPT. Kawasan Wisata Bawean;
  - IMRAN RASYIDI, S.Sos. / Penata Tk. I (III/d)
  - NIP. 19631109 199203 1 009
3. UPT. Kawasan Wisata Malik Ibrahim;
  - HERMAN NURAHMAN, S.E. / Penata Tk. I (III/d)
  - NIP. 19660609 199311 1 001

Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut gambar stuktur organisasi DISPARBUD Kabupaten Gresik:

Gambar 4.1 Stuktur DISPARBUD Kabupaten Gresik



Sumber: <https://disparbud.gresikkab.go.id/>

## 4.1.2. Desa Wisata Hendrosari

### 4.1.2.1. Sejarah Desa Hendrosari

Pada masa Kerajaan Majapahit, Desa Hendrosari mempunyai nama Desa Wonosari. Wono artinya hutan, sari artinya putik bunga yang manis. Asal usul nama Wono berasal dari banyaknya pohon lontar yang berada didesa tersebut. Pada waktu itu terdapat sebuah waduk di Desa Wonosari yang terkenal mempunyai penunggu yang cantik sehingga banyak pengunjung laki-laki yang tertarik dan silih berganti datang ke waduk. Tetapi pengunjung yang datang kesana selalu pulang dengan keadaan sakit, sehingga Desa Wonosari dikenal dengan banyak orang desa “*Mlebu waras moleh loro*”. Hal ini terjadi dikarenakan laki-laki yang datang kesana tidak hanya menuju ke waduk, tetapi juga meminum minuman keras. Sehingga istilah *loro* dalam Bahasa Indonesia artinya sakit itu tidak berarti yang sebenarnya. Sakit yang dimaksud yaitu mabuk akibat meminum minuman keras yang ada di Desa Wonosari.

Warga Desa Wonosari tidak mau desanya dikenal masyarakat luas dengan citra yang buruk. Sehingga warga seringkali melakukan berbagai macam ritual untuk menghilangkan kutukan desa yang tidak waras, dan akhirnya bersepakatlah mereka dengan mengganti nama menjadi Desa Hendrosari. Hendro artinya raja, sari artinya putik buah yang manis. Sejak digantinya nama Desa Wonosari menjadi Desa Hendrosari, lambat laun menghilangkan kutukan desa “*Mlebu waras moleh loro*” menjadi sebaliknya. Desa Hendrosari lebih banyak menerima tamu yang ingin mencari sari buah lontar yang diketahui mempunyai banyak fungsi, salah satunya yaitu untuk obat. Sehingga sampai saat ini banyak warga Desa Hendrosari yang mengolah sari buah lontar atau biasa disebut *Legen* menjadi mata pencahariannya.

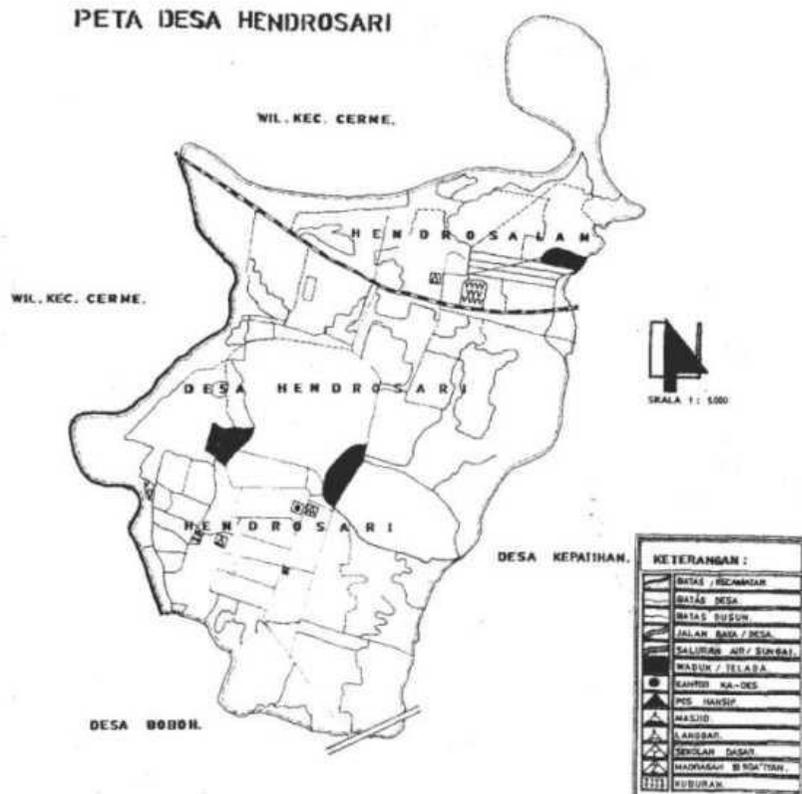
Saat ini Desa Hendrosari juga dikenal menjadi desa wisata. Terletak di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur dan terdapat kawasan wisata yaitu Edu Wisata Lontar Sewu. Diresmikan pada 9 Februari 2020, wisata ini terkenal dengan keindahan alamnya. Asal usul nama Eduwisata Lontar sewu yaitu berasal dari banyaknya pohon lontar yang terdapat di Desa Hendrosari, yang sekaligus menjadi ciri khas wisata tersebut. Selain dapat dinikmati keindahannya, terdapat juga wisata kuliner yang

terbuat dari olahan air nira yang berasal dari pohon lontar. Salah satu olahannya yang terkenal yaitu minuman *Legen*.

Edu Wisata Lontar sewu merupakan salah satu tempat alternatif untuk berlibur dan melepas penat bersama keluarga maupun teman. Selain terdapat pemandangan sawah dan banyaknya pohon lontar yang indah, juga terdapat berbagai macam wahana, yaitu wahana bermain anak, wahana air, taman rumah unik, jajanan kuliner, fasilitas area santai keluarga, dan juga beberapa titik spot untuk berfoto. Setelah puas menikmati wahana-wahana yang ada di Edu Wisata Lontar Sewu kita juga dapat menikmati berbagai macam kuliner khas yang ada disana. Ada berbagai olahan dari sari buah lontar dan juga rumah makan yang menyediakan makanan-makanan yang khas.

#### 4.1.2.2. Letak Geografis

Gambar 4.2 Peta Desa Hendrosari



Sumber: <https://hendrosaridesaid.wordpress.com/>

Desa Hendrosari terletak di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dengan luas wilayah 192 Ha yang terbagi menjadi 2 dusun yaitu Dusun Hendrosalam dan Dusun Hendrosari. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cerme Kecamatan Cerme, Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pandu Kecamatan Cerme, di Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kepatihan Kecamatan Menganti, sedangkan Di Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Boboh Kecamatan Menganti. Jarak tempuh Desa Hendrosari ke ibu kota kecamatan adalah 4 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 0.20 Jam sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 14 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 0.75 jam.

#### **4.1.2.3. Visi Misi Pemerintah Desa Hendrosari**

Visi:

Membangun dan menata Desa dengan “TAMASA SEHARI” (Tertib, aman, amanah, dan sejahtera) menuju Desa Hendrosari Mandiri.

Misi:

1. Mewujudkan pembangunan di Desa yang tertib
2. Mewujudkan kondisi desa yang aman, tertib dan kondusif
3. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang amanah, jujur, transparan dan akuntabel
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
5. Mewujudkan Desa Hendrosari menjadi Desa Mandiri

#### **4.1.2.4. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Hendrosari:

Kepala Desa	: H. Asna Hadi Seputro
Sekretaris Desa	: Arifin, S.T
Kepala Urusan Umum & TU	: Endy Sugito
Kepala Urusan Keuangan	: Suwarni
Kepala Urusan Perencanaan :	Sungkono
Kepala Divisi Pemerintahan	: M. Arif Noveri
Kepala Divisi Kesejahteraan	: H. Misdi, K.z
Kepala Divisi Pelayanan	: Edi Supriyanto
Kepala Dusun Hendrosalam	: Sunarlikan
Kepala Dusun Hendrosari	: Askun

Gambar 4.3 Stuktur Pemerintahan Desa Hendrosari



#### 4.1.2.5. Data Kependudukan

Desa Hendrosari terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Hendrosari dan Dusun Hendrosalam. Total jumlah penduduk di Desa Hendrosari sejumlah 2692 jiwa. Mata Pencaharian penduduk yaitu wiraswasta, karyawan swasta, PNS, TNI dan POLRI. Berikut merupakan data penduduk Desa Hendrosari:

Tabel 4.1 Data Kependudukan Desa Hendrosari

No.	Nama Dusun	Nama Kepala Dusun	Jumlah RT	Jumlah KK	Jiwa	Lk	Pr
1.	Hendrosalam	Sunarlikan	2	141	481	233	248
2.	Hendrosari	Askun	8	628	2211	1117	1093
<b>TOTAL</b>			10	769	2692	1350	1341

Sumber: Pemerintah desa Hendrosari

## 4.2. Penyajian Data

Gambar 4.4 Potensi Desa Hendrosari



Sumber: <https://hendrosaridesaid.wordpress.com/>

Desa Hendrosari merupakan salah satu desa di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dengan Luas 192 Ha. Terdapat dua dusun di Desa Hendrosari, yaitu Dusun Hendrosalam dan Dusun Hendrosari. Pembagian lahan di desa Hendrosari sebagian besar adalah lahan pertanian pohon lontar dan tanaman pangan padi di musim penghujan, sedangkan pada saat musim kemarau terdapat tanaman jagung dan polowijo.

Desa Hendrosari terkenal dengan pesona alamnya yang indah dan hijau dikarenakan disana terdapat kebun pohon lontar yang luas, yakni sekitar 90 Hektar. Hal ini menjadikan Desa Hendrosari menjadi salah satu tempat wisata yang digemari oleh masyarakat. Salah satunya yaitu terdapat Edu Wisata Lontar Sewu. Asal mula nama Lontar Sewu atau dalam Bahasa Indonesia artinya Seribu Lontar, berasal dari banyaknya pohon lontar yang terdapat disana. Sehingga hal ini menjadi keunikan tersendiri bagi wisata di Desa Hendrosari dan menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke Desa Hendrosari. Ditambah dengan banyaknya wahana yang terdapat didalamnya, seperti wahana bermain anak, wahana air, taman rumah unik, jajanan kuliner, fasilitas area santai keluarga, dan juga beberapa titik spot untuk berfoto. Selain Edu Wisata Lontar Sewu, Desa Hendrosari juga terkenal dengan kulinernya. Luasnya kebun pohon lontar dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk diambil buah dan sari buahnya menjadi sebuah produk makanan atau minuman khas Desa Hendrosari. Terdapat salah satu minuman khas Desa Hendrosari yang sangat terkenal, yaitu minuman *Legen* yang terbuat dari sari buah lontar yang difermentasi dan dipercaya dapat

menjadi obat. Banyak masyarakat setempat yang memproduksi *legen* dan dijual di pasaran. Bahkan pembeli minuman ini sudah tidak hanya dari masyarakat kota Gresik saja, melainkan juga sudah dari berbagai daerah. Selain itu juga terdapat berbagai UKM yang menjual berbagai olahan sari buah lontar untuk dijual ke wisatawan. Beberapa contohnya yaitu, jelly drink, pentol saus legen, jamu, dan masih banyak lagi. Terdapat juga rumah makan yang menjual makanan-makanan khas dari Kota Gresik maupun Desa hendrosari sendiri. Hal ini menjadikan banyak masyarakat Desa hendrosari yang diuntungkan perekonomiannya dan merupakan peluang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Pembangunan Desa Wisata juga telah dijelaskan didalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 – 2025 Pasal 47 tentang Kriteria Desa Wisata, meliputi :

- a. mendorong pendapatan penduduk dari sektor pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya;
- b. mendorong masyarakat berperan aktif dalam proses pembuatan keputusan tentang bentuk desa wisata yang memanfaatkan kawasan lingkungan dan penduduk setempat;
- c. penyediaan fasilitas yang dimiliki masyarakat lokal untuk peningkatan pendapatan masyarakat setempat; dan
- d. mengembangkan sikap kewirausahaan masyarakat desa.

Dijelaskan juga mengenai Perwujudan Desa Wisata di Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 – 2025 Pasal 48, meliputi :

- a. memiliki keunikan, keaslian dan sifat khas;
- b. letaknya berdekatan dengan daerah alam yang luar biasa;
- c. berkaitan dengan kelompok atau masyarakat berbudaya yang secara hakiki menarik minat pengunjung; dan
- d. memiliki peluang untuk berkembang baik dari sisi prasarana dasar maupun prasarana lainnya.

Desa Wisata di Hendrosari dikelola oleh BUMDes. Badan Usaha Milik Desa di Hendrosari berdiri sejak tahun 2016. Tetapi pada tahun 2016, BUMDes Hendrosari belum ada kegiatan sama sekali. Kemudian pada tahun 2018 BUMDes memulai program awal dengan membuat sebuah program pengolahan sampah (TPST 3R). Sampah-sampah tersebut ternyata memberikan dampak yang baik untuk masyarakat maupun untuk BUMDes sendiri. Sampah tersebut

dipilah-pilah untuk digolongkan sesuai dengan jenisnya. Yang pertama ada sampah plastik yang bisa dijual, akan dijual dan hasilnya akan masuk ke kas BUMDes. Kemudian yang kedua terdapat sampah organik yang akan diolah menjadi pupuk kompos. Yang ketiga yaitu sampah yang tidak bisa diolah dan akan dibuang ke TPA. Program pengolahan sampah tersebut mendapatkan pujian dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

Program yang kedua yaitu mengenai program desa wisata. BUMDes berwenang untuk mengelolanya. Mulai dari manajemennya, operasionalnya, pembiayaannya yang juga akan dilaporkan ke Pemerintah Desa dan BUMDes terus melakukan pengembangan terhadap desa wisata tersebut. Program Desa Wisata ini merupakan program yang diprakasai oleh Dinas Pemberdayaan Desa pada tahun 2018 setelah mereka berkunjung ke Desa Hendrosari. Yang kemudian juga pendanaannya dibantu oleh Kementerian Desa PDTT. Pada awal perencanaannya BUMDes juga ikut berperan bersama Pemerintah Desa dan juga masyarakatnya. Dan sekarang wisata tersebut sudah sukses, bahkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Program yang ketiga yaitu mengenai adanya gedung serba guna. Ini merupakan program baru yang dibuat oleh BUMDes Hendrosari. Fungsi dari gedung ini bisa bermacam-macam, baik untuk acara mau untuk tempat berolahraga. Tetapi saat ini gedung serba guna tersebut masih dalam proses pembangunan dan nantinya gedung tersebut akan disewakan untuk kepentingan warga ataupun lainnya. Program ini akan memberikan pemasukan tambahan untuk BUMDes Hendrosari.

#### Susunan Kepengurusan BUMDes:

1. Komisaris BUMDes : H. Asno Hadi Seputro
2. Ketua BUMDes: Aristoteles, S.Pd
3. Sekretaris : Dika Meiliyanto H.S
4. Bendahara : Srihayati, S.Pd

Berikut adalah susunan kepengurusan BUMDes Hendrosari:

Gambar 4.5 Stuktur BUMDes



Sumber: Pemerintah Desa Hendrosari

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa peneliti akan membahas mengenai implementasi program desa wisata dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Hendrosari, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Proses pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan enam informan yang terdiri dari:

1. Pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik
2. Kepala Desa Hendrosari
3. Ketua Badan Usaha Milik Desa Hendrosari
4. Dua Masyarakat Desa Hendrosari

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan terkait mengenai implementasi program desa wisata di Desa Hendrosari, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik:

#### 1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Merupakan hal yang penting untuk mengarahkan pelaksanaan kebijakan, hal ini dilakukan agar kebijakan publik yang sudah direncanakan dapat sesuai dengan keinginan. Sasaran dan kejelasan program harus dapat dilihat secara spesifik agar dapat mengetahui berhasil atau tidaknya suatu kebijakan yang sudah direncanakan. Tujuan dari program desa wisata menurut informan yaitu:

*“Tujuan dari adanya program desa wisata yaitu untuk perkembangan ekonomi masyarakat melalui meningkatnya PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Pengertian PDRB yaitu jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan pekonomian diseluruh daerah dalam tahun tertentu atau perode tertentu dan biasanya satu tahun, jadi diharapkan setiap tahunnya keadaan perekonomian masyarakat itu meningkat.”* (Wawancara dengan Bapak Fither selaku Seksi Pengembangan Pariwisata dan Tata Kelola Destinasi di DISPARBUD, 19 Juni 2020)

*“Tujuan Desa Wisata Hendrosari yang pertama kita punya tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, jadi dengan memanfaatkan potensi desa yang ada kebetulan kita mempunyai pohon siwalan yang sangat banyak dan itu jarang ditempat yang lain. Kemudian kita juga ada tanah kas desa disitu ada lapangan yang dulu terbengkalai lama, kemudian ada lagi waduk desa itu semua terintegrasi dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Sasarannya yaitu semua masyarakat terutama masyarakat tergolong yang tidak mampu, masyarakat yang tidak bekerja, untuk remaja. Jadi kita punya 103 PKL kemudian ada 32 karyawan, yang itu semua adalah dari warga Desa Hendrosari.”* (Wawancara dengan Bapak Arifin selaku Sekretaris Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)

*“Tujuan dari pelaksanaan desa wisata di Hendrosari ini kan kaitannya dengan BUMDes, jadi wisata desa di Hendrosari ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa, tujuannya adalah pertama untuk mensejahterahkan masyarakat. Sudah jelas. Pariwisata ini kita bisa memberdayakan masyarakat setempat dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dan yang tidak kalah penting adalah untuk meningkatkan PADes (Pendapatan Asli Desa). Sebelum adanya desa wisata, PADes itu hanya berasal dari waduk. Waduk itu setahun hanya dapat Rp. 15-20 juta. Sebelum dijadikan wahana air, waduk itu di pakai untuk tempat memancing. Tetapi setelah adanya wisata ini, banyak sekali pendapatan dari situ. Sekali permainan kan Rp. 20.000.”* (Wawancara dengan Bapak Aris selaku Ketua BUMDes Hendrosari, 25 Juni 2020)

*“Tujuan program desa wisata di Desa Hendrosari itu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Hendrosari.”* (Wawancara dengan Ibu Sidqi selaku warga Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)

*“Tujuannya untuk meningkatkan perekonomian di desa”* (Wawancara dengan Bapak Risky selaku warga Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)

Menurut penjelasan dari informan diatas sudah jelas, bahwa tujuan dari adanya program desa wisata yaitu untuk meningkatkan perekonomian

masyarakat setempat. Dijelaskan juga oleh Bapak Arifin bahwa Desa Wisata di Desa Hendrosari sarasannya yaitu untuk semua warga Desa Hendrosari yang tidak mampu, tidak bekerja dan juga remaja. Terbukti dengan adanya 130 PKL dan 32 pegawai pariwisata yang semuanya adalah berasal dari warga Desa Hendrosari.

Saat peneliti menanyakan mengenai sudah tercapainya tujuan dari desa wisata di Hendrosari kepada masyarakat setempat dan bagaimana manfaat yang dirasakan oleh masyarakat setempat, berikut penjelasan dari masyarakat Desa Hendrosari:

*“Menurut saya, sudah. Karena dilihat dari masyarakat desa itu sudah ada peningkatan, seperti tetangga saya sendiri itu. Manfaatnya, masyarakat jadi lebih terbantu, banyak pengetahuannya juga”*(Wawancara dengan Ibu Sidqi selaku warga Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)

*“Sudah tercapai, karena sudah ada kurang lebih 100 stan untuk warga disini berjualan, dan ada beberapa karyawan yang mengelola wisata ini. Manfaatnya ya sangat terbantu, bisa dilihat dengan adanya pelatihan tersebut masyarakat bisa tau dan bisa mengelola dengan baik dan benar.”*(Wawancara dengan Bapak Risky selaku warga Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)

Dari penjelasan informan tersebut, sudah jelas bahwa tujuan dari program desa wisata di Desa Hendrosari sudah tercapai dengan baik dan manfaat dari desa wisata yaitu masyarakat merasa terbantu dengan adanya program tersebut dikarenakan masyarakat mendapatkan pelatihan, sehingga masyarakat bisa menambah pengetahuan dan dapat mengelola produk. Hal tersebut sudah sesuai dengan salah satu kriteria desa wisata menurut RIPKD Kabupaten Gresik Tahun 2013 – 2025 Pasal 47 yaitu mendorong pendapatan penduduk dari sektor pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya.

Selain tujuan juga terdapat ukuran/tolok ukur keberhasilan dari adanya program desa wisata di Kabupaten Gresik, khususnya di Desa Hendrosari Kecamatan Gresik, menurut informan ukuran keberhasilannya yaitu:

*“Ukuran keberhasilan program desa wisata ya dapat dilihat dari banyaknya peningkatan perekonomian yang ada di masyarakat itu sendiri. Atau juga bisa dilihat dari meningkatnya PDRB di desa tersebut. Kalau terdapat peningkatan berarti program desa wisata itu*

*berhasil.*”(Wawancara dengan Bapak Fither selaku Seksi Pengembangan Pariwisata dan Tata Kelola Destinasi di DISPARBUD, 19 Juni 2020)

*“Tolok ukurnya nanti kesejahteraan masyarakat”* (Wawancara dengan Bapak Arifin selaku Sekretaris Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)

*“Tolok ukur keberhasilan, kita kan sebelum membangun wisata ini kan diminta oleh pemerintah desa untuk ada capaian yang harus dicapai (Target) jadi kita bikin wisata ini ada target apa sih besok? jadi ditarget. Dari yang akan kita kembangkan menjadi wisata itu kemaren kita hitung sekitar Rp. 1 Milyar - Rp. 1,5 Milyar. Jadi sebelum ada BUMDes itu PADes itu hanya Rp. 15 – 20 juta per tahun. Dengan adanya BUMDes ini ada wisata. Tapi target kita Rp. 1 – 1,5 Milyar per tahun. Pada Januari kemarin kita dapat Rp. 60 juta, Februari dan Maret per bulannya Rp. 160 juta. Jadi Tolok ukur keberhasilannya terdapat pada target yang akan dicapai, dan alhamdulillah setiap bulan sudah ada peningkatan. Dan semoga pertahunnya bisa mencapai target yang diinginkan.”* (Wawancara dengan Bapak Aris selaku Ketua BUMDes Hendrosari, pada 25 Juni 2020)

Menurut Bapak Fither, tolok ukur keberhasilan dari adanya program desa wisata yaitu terdapat peningkatan perekonomian masyarakat desa setempat. Apabila perekonomian masyarakat terdapat perubahan ke yang lebih baik, maka program desa wisata tersebut dapat dikatakan berhasil. Bapak Arifin juga berpendapat demikian, tolok ukur keberhasilannya yaitu kesejahteraan masyarakat yang juga sama artinya dengan peningkatan perekonomian masyarakat. Apabila perekonomian masyarakat sudah terjamin dan meningkat perkembangannya, maka masyarakat desa akan sejahtera. Sedangkan menurut Bapak Aris tolok ukuran keberhasilannya yaitu bisa mencapai target pencapaian yang ditentukan oleh BUMDes, yaitu sekitar Rp. 1 – 1,5 Milyar.

## 2. Sumber daya

Terdapat bermacam-macam sumber yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu sumber daya manusia, sumber daya biaya, sumber daya pemasaran, sumber daya peralatan, sumber daya metode.

Sumber daya manusia merupakan penggerak dari suatu program atau kebijakan, bentuk partisipasi masyarakat lah yang menjadi penggerak dari program Desa Wisata, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaannya.

Berikut adalah penjelasan mengenai proses perencanaan awal desa wisata di Desa Hendrosari:

*“Jadi proses perencanaan awal itu sebenarnya, sejak tahun 2013 kita sudah pernah merencanakan untuk bikin wisata, dan sudah pernah dicanangkan oleh Pak Bupati pada waktu itu. Jadi proses yang panjang, tapi ternyata itu tidak terlaksana, dan mulai terlaksana itu di tahun 2018 itu ada program dari pihak ketiga yang memancing sehingga akhirnya kita dari pemerintah desa bermusyawarah, kemudian kita putuskan melalui musyawarah itu. Jadi potensi desa yang ada itu kita jadikan sebagai wisata.” (Wawancara dengan Bapak Arifin Selaku Sekretaris Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)*

*“Jadi 2016 itu sudah ada BUMDes tapi tidak jalan sama sekali, kemudian pada tahun 2018 saya menjadi ketua BUMDes dan diawali dengan adanya program tempat pengelolaan sampah, TPST 3R namanya. Program tersebut berjalan mulus kemudian kita ikut lomba desa tingkat kabupaten pada tahun 2018 dan mendapatkan juara 3. Tapi dari dinas pemberdayaan masyarakat desa tertarik, karena ada desa berani mengelola sampah. Dan pada saat mengunjungi desa untuk melihat pengelolaan sampah, dinas tertarik dengan adanya potensi alam yang ada disini dan ingin mengembangkannya menjadi desa wisata. Tahun 2013 pernah dicanangkan oleh bupati untuk menjadi desa wisata, tetapi tidak berjalan karna tidak ada yang mendukung. Kemudian dinas membantu program ini dan dikirimkan ke pusat, dan disetujui untuk membuka wisata” (Wawancara dengan Bapak Aris selaku Ketua BUMDes Hendrosari, pada 25 Juni 2020)*

Proses perencanaan Desa wisata di Desa Hendrosari sudah dilakukan sejak tahun 2013, tetapi tidak terlaksana hingga tahun 2018. Terlaksananya program ini juga dikarenakan adanya pihak ketiga yang mendorong masyarakat setempat untuk mengembangkan lagi potensi yang ada di desanya, setelah melalui proses musyawarah dengan warga, akhirnya potensi yang ada di setuju untuk dijadikan tempat wisata.

Terbentuknya desa wisata juga terdapat keterlibatan masyarakat dalam perencanaannya, seperti yang dijelaskan oleh para informan sebagai berikut:

*“Kita kan melalui musyawarah desa, di musyawarah desa itu yang kita undang ada lembaga desa, kemudian ada tokoh masyarakat dan juga masyarakat sendiri, itu kita undang, kita ajak musyawarah bersama. Termasuk ketika pelaksanaan di lapangan itu pekerjanya juga banyak yang dari warga Hendrosari sendiri. Jadi turut aktif mereka di pekerjaan maupun mulai dari perencanaan.” (Wawancara dengan Bapak Arifin Selaku Sekretaris Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)*

Menurut penjelasan diatas, masyarakat dilibatkan dalam perencanaan desa wisata melalui musyawarah desa dengan mengundang beberapa masyarakat dan tokoh masyarakat. Berikut adalah pendapat atau respon dari masyarakat pada saat awal perencanaan program Desa Wisata Hendrosari:

*“Kebanyakan mereka sudah terbantu, masyarakat yang tidak bekerja, kemudian anak-anak remaja yang tidak bekerja, sekarang sudah mendapatkan lapangan pekerjaan disitu. Jadi sudah ada 32 karyawan disana, kemudian yang dulu mereka tidak bisa berjualan, sekarang ada 103 PKL yang berjualan disana.”* (Wawancara dengan Bapak Arifin Selaku Sekretaris Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)

*“Responnya sangat baik, senang gitulo. Ada kesempatan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Hendrosari. Masyarakat sangat mendukung adanya program desa wisata ini”* (Wawancara dengan Ibu Sidqi selaku warga Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)

*“Sangat antusias, dilihat dari partisipasi masyarakat untuk berjualan di lapak”* (Wawancara dengan Bapak Risky selaku warga Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)

Respon masyarakat juga baik saat proses perencanaan desa wisata, hal ini dikarenakan masyarakat merasa adanya desa wisata ini dapat membantu meningkatkan perekonomian mereka dan mereka senang jika dapat berpartisipasi pada saat pelaksanaannya.

Selain perencanaan, masyarakat juga dilibatkan dalam proses pelaksanaan desa wisata di Desa Hendrosari, yaitu:

*“Mulai dari pekerjaan ketika di lapangan itu mayoritas pekerjanya juga adalah warga Desa Hendrosari, itu yang ketika proses pembangunan. Kalau untuk yang proses ini juga sama, ini semua kan sudah dilaksanakan oleh BUMDes.”*(Wawancara dengan Bapak Arifin Selaku Sekretaris Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)

*“Ya pada saat pembangunan awal disini ramai, semua ikut berpartisipasi. Dan pada saat pelaksanaan pun semua ikut membantu dan ada beberapa karyawan juga yang ikut mengelola pariwisata dan itu semua dari warga lokal.”* (Wawancara dengan Bapak Aris selaku Ketua BUMDes Hendrosari, pada 25 Juni 2020)

*“Sangat antusias sekali, masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaannya. Seperti contohnya di perbolehkan berjualan di kawasan wisata”* (Wawancara dengan Ibu Sidqi selaku warga Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)

*“Dari semua masyarakat sudah terlibat, mulai dari pemuda, BUMDes yang mengelola wisata ini sehingga masyarakat bisa berjualan di lapak yang disediakan oleh pengelola”* (Wawancara dengan Bapak Risky selaku warga Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)

Dalam pelaksanaannya, masyarakat juga dilibatkan. Mulai dari awal pembangunan, masyarakat sudah dilibatkan dalam proses pembangunannya, seperti menjadi pekerja bangunannya. Pada saat pelaksanaannya masyarakat diberikan kesempatan untuk membuka usaha dan diperbolehkan berjualan di area wisata. Menurut informasi dari warga desa, mereka sudah merasa dilibatkan didalam pelaksanaan dengan diperbolehkannya berjualan dan membuka usaha di daerah wisata.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, pemerintah desa juga mengadakan pelatihan, dijelaskan oleh masyarakat desa sebagai berikut:

*“Sosialisasi terus menerus, intinya kan bagaimana bisa jalan itu pemerintah desa, BPD, BUMDes, tokoh-tokoh masyarakat itu kita ajak. Pelatihan-pelatihan juga dilakukan yaitu pelatihan kuliner, pelatihan pembuatan produk dari potensi desa.”* (Wawancara dengan Bapak Aris selaku Ketua BUMDes Hendrosari, pada 25 Juni 2020)

*“Iya pernah ada pelatihan, biasanya ada kumpul rapat gitu, ada pelatihan-pelatihan membuat produk olahan legen, baju-baju dari lontar”* (Wawancara dengan Ibu Sidqi selaku warga Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)

*“Iya sudah, dari dinas sudah pernah menyediakan pelatihan untuk bagaimana mengelola wisata dan produk dari olahan siwalan maupun legen”* (Wawancara dengan Bapak Risky selaku warga Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)

Pelatihan sudah pernah dilaksanakan di Desa Hendrosari sebelumnya, jadi warga sudah ada bekal mengenai pengelolaan produk dan pengelolaan pariwisata. Sehingga masyarakat sudah ada bekal untuk membuka usaha.

Tanpa adanya sumber daya biaya, maka program desa wisata juga tidak akan pernah bisa terlaksana. Proses pendanaan menurut beberapa informan sebagai berikut:

*“Proses perencanaan pendanaan desa wisata itu bisa dimasukkan dari Anggaran Dana Desa. Mekanisme anggaran dana desa dilakukan secara bertahap dari Pemerintah Pusat (APBN) ke Kabupaten/kota (APBD), dan selanjutnya ke Desa (APBDes). Kalau jalur bantuan keuangan itu melalui*

*usulan desa lewat Bappeda, nanti mendapatkan persetujuan dari dinas terkait, melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Untuk sumber dananya bisa melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan juga Anggaran Dana Desa”(Wawancara dengan Bapak Fither selaku Seksi Pengembangan Pariwisata dan Tata Kelola Destinasi di DISPARBUD, 19 Juni 2020)*

*“Jadi proses pendanaan untuk kita mewujudkan wisata ini ada dana yang bersumber dari bantuan kementerian desa, jadi programnya namanya PIID-ITPEL. Itu kita dapat kurang lebih Rp. 1,3 Milyar hampir Rp. 1,4 Milyar. Kemudian dari dana desa ada Rp. 300 juta.” (Wawancara dengan Bapak Arifin selaku Sekretaris Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)*

*“Untuk awal pembuatan mendapatkan dari Kementerian Desa Rp. 1,3 M untuk pembuatan fasilitas, kemudian ada dana desa, dan dari BUMDes. Untuk biaya pengelolaannya ya dapat dari tiket masuk, itu aja per bulan mendapatkan Rp. 160 juta, dikurangi untuk gaji pegawai Rp. 40 juta itu saja sudah sisa berapa. Jadi biaya pengelolaan ya dari situ.” (Wawancara dengan Bapak Aris selaku Ketua BUMDes, pada 25 Juni 2020)*

Proses perencanaan dana untuk program desa wisata menurut Bapak Fither dapat dilakukan melalui rancangan anggaran dana desa. Dapat juga melalui jalur bantuan keuangan, tetapi harus melalui usulan desa lewat Bappeda dengan persetujuan dinas terkait melalui musrenbang. Untuk sumber pendanaan program desa wisata berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan juga berasal dari Dana Desa Sedangkan menurut Bapak Arifin untuk pendanaan Desa Wisata Hendrosari bersumber dari bantuan kementerian desa dan juga dan desa.

Membahas mengenai biaya, juga diperlukan adanya transparansi atau keterbukaan dan juga bagi hasil mengenai pendanaan program desa wisata:

*“Disetiap program pembangunan disitu ada banner yang bertuliskan semua anggaran, yang dilaksanakan disitu, sumbernya dari apa, itu semua ada. Termasuk publikasi melalui grup whatsapp dan lain sebagainya. Jadi supaya masyarakat itu tau, ini besaran anggarannya berapa, sumbernya dari mana, dan diberikan untuk apa.” (Wawancara dengan Bapak Arifin selaku Sekretaris Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)*

*“Ada bagi hasil yang dilakukan, yaitu dengan masyarakat diperbolehkan untuk jualan itu tadi.” (Wawancara dengan Ibu Sidqi selaku warga Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)*

*“Ya merasakan, seperti dengan adanya pengelolaan desa wisata ini ada beberapa warga yang bekerja di kawasan wisatanya. Seperti menjadi petugas kebersihan, penjaga karcis, dan pengelola lainnya”* (Wawancara dengan Bapak Risky selaku warga Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)

Transparansi sudah dilakukan oleh pihak pemerintah desa dengan memasang banner, dan mempublikasikannya dengan tujuan agar masyarakat mengetahui besaran anggaran, sumbernya dari mana dan digunakan untuk apa.

Kemudian juga terdapat sumber daya pemasaran, yaitu bagaimana cara mempromosikan desa wisata di hendrosari:

*“Ya dapat melalui sosial media yang ada, seperti contohnya you tube dan lain sebagainya”* (Wawancara dengan Bapak Fither selaku Seksi Pengembangan Pariwisata dan Tata Kelola Destinasi di DISPARBUD, 19 Juni 2020)

*“Kalau untuk promosi, sekarang sudah banyak melalui media elektronik. Jadi masuk di dunia maya, melalui sosial media, melalui instagram, melalui facebook, melalui you tube atau lain sebagainya.”* (Wawancara dengan Bapak Arifin selaku Sekretaris Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)

*“Melalui online, banyak youtuber masuk disini untuk meliput.”* (Wawancara dengan Bapak Aris selaku Ketua BUMDes, 25 Juni 2020)

*“Lewat sosial media, biasanya kan ibu-ibu diposting di instagram, di whatsapp, juga.”*(Wawancara dengan Ibu Sidqi selaku warga Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)

*“Ya melalui banyak media, mulai dari mulut ke mulut, dari sosial media, mulai dari facebook, instagram, maupun dari whatsapp”* (Wawancara dengan Bapak Risky selaku warga Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)

Menurut penjelasan informan diatas, promosi atau pemasaran kawasan wisata yang ada di Desa Hendrosari yaitu rata-rata melalui sosial media. Promosi atau pemasaran melalui sosial media/internet juga tertera di dalam persyaratan berdirinya desa wisata menurut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik yaitu dalam poin Promosi yang dilakukan desa wisata dalam mendatangkan wisatawan:

1. Brosur
2. Pameran/festival
3. Internet

4. Digital
5. Dll.

Terdapat juga sumber daya peralatan yang mendukung terlaksananya program desa wisata di Desa Hendrosari. Berikut penjelasan oleh informan:

*“Ada permainan sepeda air atau wahana air, kemudian ada cafe, ada tempat bermain anak, disitu didalamnya ada rumah balon, ada kereta api mini, ada komedi helly, ada spot foto, ada taman kelinci yang masih berproses, kemudian ada jembatan titian bisa dijadikan untuk spot foto juga. Kemudian ada lagi flying fox insyaallah nanti minggu depan buka, ada dua jenis flying fox, ada untuk anak-anak dan juga orang dewasa. Dan kita juga ada fasilitas-fasilitas seperti aula, gazebo-gazebo untuk tempat orang makan, kemudian juga ada musholla, kios-kios, dan toilet. Kios- kios didepan tempat wisata itu masih terbatas dana, jadi sementara mereka membuat tempat sendiri, tapi terintegrasi semua. Mungkin kedepannya nanti dibuatkan lokasi sendiri termasuk untuk penataan UKMnya, dan juga nanti disediakan tempat parkir sendiri.”* (Wawancara dengan Bapak Arifin Selaku Sekretaris Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)

*“Ini sebenarnya kita rencana membuat kolam, fasilitas masih perlu banyak dikembangkan lagi, tetapi masih menunggu dana. Dan pembangunan sekarang sempat terhenti dikarenakan Covid-19.”* (Wawancara dengan Bapak Aris selaku Ketua BUMDes Hendrosari, 25 Juni 2020)

*“Iya sudah. Tetapi belum ada homestay untuk wisatawan, tetapi untuk fasilitas yang lain sudah ada seperti toilet dan rumah makan”* (Wawancara dengan Ibu Sidqi selaku warga Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)

*“Menurut saya, karena wisata ini sudah berdiri, ya sudah bisa dijadikan tempat wisata. Karena sudah ada penunjang mulai dari tempat berjualan makan, toilet, musholla, maupun aula tetapi untuk homestay ini masih belum ada.”* (Wawancara dengan Bapak Risky selaku warga Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)

Berdasarkan data diatas, fasilitas yang ada di kawasan wisata Desa Hendrosari sudah baik. Begitupun juga menurut bapak Arifin, hanya saja kios-kios pedagang masih belum bisa disediakan secara layak dikarenakan anggaran yang terbatas dan untuk fasilitas *homestay* masih belum ada. Ada juga beberapa fasilitas yang masih harus dikembangkan lagi menurut Pak Aris. Sedangkan didalam persyaratan fasilitas pendukung menurut DISPARBUD dalam implementasi program desa wisata, terdapat beberapa fasilitas pendukung yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Penginapan/*Homestay*
2. Warung makan/Restoran
3. Toko cinderamata
4. Balai pertemuan
5. Peta dan tanda informasi
6. Pusat informasi pariwisata
7. Toilet umum
8. Area parkir
9. Tempat sampah
10. Jaringan telekomunikasi
11. Jaringan listrik
12. Sarana pendukung lainnya

Fasilitas tersebut haruslah dipenuhi agar pelaksanaan desa wisata lebih baik dan wisatawan yang berkunjung menjadi nyaman dan ingin berkunjung lagi.

Selain itu juga terdapat sumber daya metode untuk implementasi desa wisata, berikut penjelasan dari informan:

*“Upaya pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu melalui adanya pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Terbukti sudah ada 103 Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sekitar desa wisata, dan juga terdapat 32 petugas pariwisata yang merupakan warga Desa Hendrosari.”* (Wawancara dengan Bapak Arifin Selaku Sekretaris Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)

*“Upaya BUMDes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat ya itu tadi, dengan mempekerjakan warga untuk menjadi petugas di kawasan wisata. Kemudian membuka tempat untuk UKM lokal berjualan. Ada sekita 32 pekerja dan 103 UKM yang berjualan. Disitu saja sudah jelas upaya BUMDes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat”* (Wawancara dengan Bapak Aris selaku Ketua BUMDes Hendrosari, 25 Juni 2020)

Upaya pemerintah dibantu dengan upaya masyarakat untuk menjaga eksistensi desa wisata di Hendrosari, yaitu:

*“Dengan ikut merawat, supaya kedepannya lebih maju. Mempertahankannya juga bisa lewat sosial media dengan cara sering upload mengenai kawasan wisata yang ada di Desa Hendrosari.”* (Wawancara dengan Ibu Sidqi selaku warga Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)

*“Semua masyarakat sudah bekerja sama, terbukti dengan terwujudnya wisata ini. Tanpa adanya kolaborasi dari masyarakat dan pemerintah desa maka desa wisata ini tidak akan bisa berdiri”* (Wawancara dengan Bapak Risky selaku warga Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)

Upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian yaitu dengan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat sehingga mengurangi pengangguran yang ada di desanya. Didukung dengan upaya masyarakat untuk menjaga eksistensi desa wisatanya.

### 3. Karakteristik Agen Pelaksana

Salah satu faktor keberhasilan kebijakan juga dapat dilihat dari sifat atau ciri-ciri instansi/badan pelaksana kebijakan. Hal tersebut sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya.

Berikut adalah penjelasan mengenai peran masing-masing informan di pelaksanaan program desa wisata:

*“Melalui Dinas Pariwisata itu ada namanya pembinaan, pengawasan, dan tata kelola. Pembinaan dan pengembangan melalui Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). Disitu akan muncul sosialisasi, rapat-rapat, monitoring, dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.”* (Wawancara dengan Bapak Fither selaku Seksi Pengembangan Pariwisata dan Tata Kelola Destinasi di DISPARBUD, 19 Juni 2020)

*“Kita mulai dari perencanaan, kemudian ketika pelaksanaan kita juga ikut serta disitu, kemudian saat wisata sudah berjalan kita juga ada disitu sebagai fungsi pengawasan. Tetapi untuk pengelola utama masih di BUMDes.”* (Wawancara dengan Bapak Arifin selaku Sekretaris Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)

*“Peran BUMDes mengatur mengenai manajemennya, operasionalnya, karena semua dikelola bumdes, pemerintah desa juga hanya mengawasi”* (Wawancara dengan Bapak Aris selaku Ketua BUMDes Hendrosari, 25 Juni 2020)

*“Peran pemerintah desa itu yang mengawasi sedangkan BUMDes yang mengelola.”* (Wawancara dengan Ibu Sidqi selaku warga Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)

*“Pemerintah desa hanya sebagai pengawas, sedangkan BUMdes juga ikut berpartisipasi dalam pengelolaan.”* (Wawancara dengan Bapak Risky selaku warga Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)

Setiap agen pelaksana memiliki peran masing-masing, seperti DISPARBUD yang memberikan pembinaan, pengawasan, dan tata kelola pariwisata kepada pemerintah desa setempat. Kemudian Pemerintah Desa bertugas untuk mengawasi dan monitoring pengelolaan wisata kepada BUMDes, sedangkan BUMDes bertugas untuk mengelola wisatanya.

#### 4. Sikap/kecenderungan pelaksana

Dalam implementasi kebijakan mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Hal ini dikarenakan para pelaksana lah yang merumuskan kebijakan dan bukan warga atau masyarakat.

*“Kewenangannya ya dengan melakukan pembinaan, pengawasan dan juga mengatur tata kelolanya.”* (Wawancara dengan Bapak Fither selaku Seksi Pengembangan Pariwisata dan Tata Kelola Destinasi di DISPARBUD, 19 Juni 2020)

*“Setiap triwulan itu kan harus ada laporan dari BUMDes, di laporan itu diketahui oleh desa laporan keuangannya, kemudian nanti disetiap akhir tahun anggaran itu kan juga ada pembagian presentase untuk masuk PADes berapa, masuk ke BUMDes berapa, masuk ke pengelolanya berapa, jadi kita hadir disitu juga.”* (Wawancara dengan Bapak Arifin selaku Sekretaris Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)

*“Kewenangan BUMDes ya melakukan pengelolaan Kawasan wisata, dan juga selalu komunikasi dengan pemerintah desa.”* (Wawancara dengan Bapak Aris selaku Ketua BUMDes Hendrosari, 25 Juni 2020)

*“Keterlibatan pemerintah desa ya dengan melakukan pengawasan terhadap wisata ini.”* (Wawancara dengan Ibu Sidqi selaku warga Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)

*“Keterlibatannya ya dengan cara mengawasi jalannya wisata ini.”* (Wawancara dengan Bapak Risky selaku warga Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)

Masing-masing pelaksana memiliki kewenangan berbeda-beda. Kewenangan DISPARBUD yaitu dengan melakukan pembinaan, pengawasan dan tata kelolanya. Sedangkan untuk Pemerintah Desa yaitu menerima dan mengurus laporan tiap tri wulan dan pertahunnya untuk pengelolaan desa wisata, BUMDes mengelola dan masyarakat juga menambahkan bahwa kewenangan pemerintah desa yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan desa wisata.

Selain kewenangan tersebut, peneliti juga ingin mengetahui bagaimana sikap pelaksana saat musyawarah mengenai desa wisata:

“Iya bisa memberikan kritik dan saran, bisa melalui rapat ataupun media sosial” (Wawancara dengan Ibu Sidqi selaku warga Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)

*“iya, ada jadi melalui tokoh masyarakat yang mewakili aspirasi dari masyarakat sini. Bisa melalui musyawarah, bisa memaparkan kritik dan sarannya didalam musyawarah tersebut.”* (Wawancara dengan Bapak Risky selaku warga Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)

*“Tidak, itu ada yang mewakilkan. Untuk musyawarahnya dari masyarakat ada yang mewakilkan”* (Wawancara dengan Ibu Sidqi selaku warga Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)

*“Untuk pengambilan keputusan, jadi semua keputusan tetap ada di pengelola. Semua kritik dan saran jika baik bisa ditampung dan dikembangkan lagi, bisa dimusyawarahkan lagi apakah kritik dan saran itu bisa membangun bagi wisata ini.”* (Wawancara dengan Bapak Risky selaku warga Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)

Sikap pelaksana cenderung terbuka dengan saran dan juga kritikan dari warga, hal ini dibuktikan dengan adanya wakil masyarakat yang diajak untuk bermusyawarah. Tetapi untuk pengambilan keputusan tetap di tangan pemerintah

##### 5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan

Komunikasi yang terjalin antar organisasi maupun komunikasi antar aktivitas pelaksana, merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik, semakin baik komunikasi yang terjalin maka semakin kecil kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam suatu proses implementasi.

*“Komunikasi dilakukan secara online dan offline. Untuk yang online ada grup Whatsapp nya bersama Pokdarwis dan grup forum pengelola objek pariwisata. Kalau offline melalui monitoring.”* (Wawancara dengan Bapak Fither selaku Seksi Pengembangan Pariwisata dan Tata Kelola Destinasi di DISPARBUD, 19 Juni 2020)

*“Alhamdulillah baik sekali, dengan DISPARBUD juga baik, setiap ada apapun kita selalu konfirmasi ke sana. Kalau untuk ke BUMDes kita setiap ada apapun selalu komunikasi dan koordinasi. Bahkan setiap mengambil kebijakan apapun mereka (BUMDes) juga sering melibatkan kita di*

*desa.”(Wawancara dengan Bapak Arifin Selaku Sekretaris Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)*

*“Komunikasi ya terus menerus melakukan komunikasi, semua sebelum dibangun pun kita melakukan komunikasi dulu dengan masyarakat melalui musyawarah desa. Ya meskipun ada pro dan kontra tetapi alhamdulillah sekarang masyarakat sudah senang dan bisa menerima, bahkan sampai saat ini pun masih terus komunikasi dengan masyarakat. Koordinasi terus, kalau ada apapun tetap di musyawarahkan dulu. Komunikasi setiap hari dilakukan dengan pemerintah desa.” (Wawancara dengan Bapak Aris selaku Ketua BUMDes Hendrosari, 25 Juni 2020)*

*“Bentuk komunikasinya ya lewat musyawarah itu tadi, jadi kalau ada apa-apa diomongkan lewat musyawarah desa.” (Wawancara dengan Ibu Sidqi selaku warga Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)*

*“Untuk komunikasi berjalan dengan baik, dikarenakan kita semua sering bertemu. Dan semua karyawan yang bekerja disini juga dari warga sendiri. Jadi semua komunikasi berjalan dengan baik.” (Wawancara dengan Bapak Risky selaku warga Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)*

Komunikasi antar organisasi terlaksana dengan baik, antara DISPARBUD, pemerintah desa, BUMDes maupun dengan masyarakat.

Saat pelaksanaan program desa wisata, pasti ada hambatan pada saat pelaksanaannya. Berikut merupakan penjelasan mengenai hambatan pada saat pelaksanaan program desa wisata di Hendrosari:

*“Hambatannya luar biasa banyak, program ini sebenarnya sudah sejak tahun 2013 tapi ternyata tidak berjalan sampai tahun 2018. Sudah berjalan sejak tahun 2018 program ini kita anggarkan dari dana desa, dan dibarengi dengan program yang dari pusa. Dan itu pun pada saat pelaksanaan banyak tantangan juga. Tantangannya terutama pada anak-anak muda yang waktu itu tidak setuju, karena waktu itu lapangan yang dipakai untuk tempat wisata merupakan lapangan bola dulu. Lapangan bola ini sudah terbengkalai sudah sejak lama, puluhan tahun lamanya. Rumputnya tinggi-tinggi tidak dimanfaatkan. Akhirnya kita memanfaatkan untuk lahan wisata ini. Kemudian pada saat proses-proses awal di kebijakan itu juga agak susah, jadi saya waktu melontarkan gagasan oh ini dibentuk wisata, tidak serta diterima oleh lembaga. Harus melalui mekanisme yang sangat panjang.” (Wawancara dengan Bapak Arifin Selaku Sekretaris Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)*

*“Hambatannya ada beberapa warga yang kontra dan tidak setuju pada awal pembuatan pariwisata. Tetapi kita selalu koordinasikan dengan warga. Seperti masalah kios UKM, yang awalnya hanya 5 UKM lama-lama menjadi membludak dan sempat meributkan masalah tempat. Sehingga sementara membuat kios didepan tempat wisata dan seadanya”* (Wawancara dengan Bapak Aris selaku Ketua BUMDes Hendrosari, 25 Juni 2020)

Pada saat pelaksanaa sudah dipastikan akan ada hambatan saat melaksanakan, tetapi juga harus ada upaya dari pemerintah ataupun BUMDes sebagai pengelola untuk mengatasi hambatan tersebut, berikut penjelasan informan:

*“Komunikasi. Jadi menjalin hubungan yang baik. Yang passti kita harus menguasai ilmunya dulu. Kita komuikasi dengan semuanya.”* (Wawancara dengan Bapak Arifin Selaku Sekretaris Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)

*“Untuk mengatasi hambatan tersebut melalui komunikasi, ya ada rapat desa. Selalu kalau ada apa-apa kita omongkan dengan warga, tokoh masyarakat, BPD, jadi kita tidak pernah mengambil keputusan sendiri, jadi selalu koordinasi dengan pemerintah desa terus.”*(Wawancara dengan Bapak Aris selaku Ketua BUMDes Hendrosari, 25 Juni 2020)

#### 6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik merupakan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal tersebut merupakan salah satu faktor keberhasilan suatu implementasi kebijakan, karena jika lingkungan eksternal tersebut kondusif maka akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

*“Sangat support maksimal, kita lebih memprioritaskan buttom up. Desa itu mengusulkan apa kita akan mendengarkan. Jadi usulan dari bawah, kita mengarahkan. Desa itu pengennya apa, kita mengarahkan. Tapi tidak dalam arti interfeksi. Jadi desa itu pengennya apa kita mengarahkan tata kelolanya.”* (Wawancara dengan Bapak Fither selaku Seksi Pengembangan Pariwisata dan Tata Kelola Destinasi di DISPARBUD, 19 Juni 2020)

*“Iya, jadi program PIID-TPEL, yang dari kementerian desa kalo di kabupaten itu prakarsa dari dinas pemberdayaan masyarakat desa, kemudian setelah mulai berjalan itu sekarang dinas pariwisata juga ikut.”*(Wawancara dengan Bapak Arifin Selaku Sekretaris Desa Hendrosari, 24 Juni 2020)

*“Kebijakannya sangat mendukung sekali, buktinya kita tidak pernah ada masalah.”*(Wawancara dengan Bapak Aris selaku Ketua BUMDes Hendrosari, 25 Juni 2020)

*“Ya ada peningkatan yang baik sekali, buktinya banyak orrang yang berjualan dan bisa menambah penghasilan.”* (Wawancara dengan Ibu Sidqi selaku warga Desa Hendrosari, 25 Juni 2020)

*“Kondisi ekonomi warga lebih baik.”* (Wawancara dengan Bapak Risky selaku warga Desa Hendrosari, 25 Juni 2020)

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik sangat mendukung kebijakan pemerintah kabupaten dalam mendukung pelaksanaan desa wisata di Kabupaten Gresik. Begitupun Pemerintah Desa dan juga BUMDes sangat mendukung adanya kebijakan tersebut.

### **4.3. Pembahasan**

Setelah penyajian data diatas, langkah selanjutnya yaitu pembahasan. Pembahasan hasil penelitian merupakan interpretasi hasil akhir dalam melakukan pengujian data dengan teori dan konsep para ahli sehingga bisa mengembangkan teori atau bahkan menemukan teori baru serta mendeskripsikan hasil data dan fakta di lapangan, peneliti dalam hal ini menghubungkan temuan hasil penelitian di lapangan dengan dasar operasional yang telah ditetapkan, dalam hal ini menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn. Terdapat 6 indikator yang akan dibahas didalam penelitian ini menurut teori tersebut, yaitu:

#### **1. Ukuran dan tujuan kebijakan**

Berdasarkan hasil penelitian, tujuan program desa wisata di Desa Hendrosari yaitu untuk mensejahterahkan masyarakatnya, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan perekonomiannya. Hal ini terbukti dengan naiknya Pendapatan Asli Desa Hendrosari sejak adanya program desa wisata. Awalnya Pendapatan Asli Desa hanya Rp. 15 – 20 juta saja setiap tahunnya. Tetapi setelah adanya program desa wisata, Pendapatan Asli Desa mengalami peningkatan yang drastis menjadi Rp. 60 – 160 juta. Masyarakat Desa Hendrosari juga merasakan adanya perubahan pada perekonomiannya. Sehingga tujuan dari implementasi program desa wisata dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sudah sesuai keinginan.

Seperti yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn bahwa sasaran dan kejelasan program harus dapat dilihat secara spesifik agar dapat mengetahui berhasil

atau tidaknya suatu program yang sudah direncanakan. Sasaran program Desa wisata di Desa hendrosari yaitu masyarakat yang tergolong tidak mampu, masyarakat yang tidak bekerja dan untuk para remaja. Sesuai data di lapangan, sasaran tersebut sudah tepat dan terlaksana dengan baik. Dapat dibuktikan dengan adanya UKM dan pegawai yang berada disana. Terdapat 103 PKL dan 32 karyawan yang merupakan masyarakat setempat.

Ukuran kebijakan merupakan tolok ukur keberhasilan suatu program menurut Van Meter dan Van Horn. Tolok ukur keberhasilannya menurut pemerintah daerah dan pemerintah desa yaitu adanya peningkatan terhadap kesejahteraan dan perekonomian masyarakat setempat serta peningkatan Pendapatan Asli Desa menurut BUMDes. Hal tersebut sudah tercapai dan membuktikan bahwa program desa wisata di Desa Hendrosari sudah sesuai dengan tujuan dan ukuran keberhasilan menurut Van Meter dan Van Horn.

Jika dilihat dari RIPKD Kabupaten Gresik 2013-2025 tentang rencana desa wisata pasal 47 mengenai kriteria desa wisata di salah satu poinnya menyebutkan bahwa desa wisata yaitu mendorong pendapatan penduduk dari sektor pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya. Sesuai dengan tujuan dari program desa wisata menurut pemerintah daerah dan juga pemerintah desa bahwa tujuan adanya desa wisata yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui potensi yang ada di desanya, seperti pemanfaatan sari buah nira yang ada di Desa Hendrosari dan diolah menjadi berbagai macam olahan kuliner khas Desa Hendrosari.

## 2. Sumber Daya

Terdapat beberapa sumber daya yang akan dibahas oleh peneliti, yaitu:

### a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan penggerak atau pelaksana kebijakan. Hal ini yang dimaksud penggerak atau pelaksananya yaitu masyarakat Desa Hendrosari. Dari mulai perencanaan program sampai pelaksanaan, masyarakat selalu dilibatkan oleh pemerintah desa maupun BUMDes. Terbukti dengan respon yang baik dari masyarakat saat awal direncanakannya program desa wisata ini. Bahkan masyarakat lah yang bergotong royong untuk membangun tempat wisata dan ikut andil dalam musyawarah desa. Hal ini sudah mencapai kriteria desa wisata menurut RIPKD Kabupaten Gresik 2013-2025 tentang rencana desa wisata pasal 47 bahwa adanya desa wisata yaitu mendorong masyarakat berperan aktif dalam proses pembuatan keputusan tentang bentuk desa wisata yang

memanfaatkan kawasan lingkungan dan penduduk setempat. Masyarakat juga diberikan pelatihan agar mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi yang ada, baik pelatihan membuat produk maupun mengenai pengembangan wisata. Hal ini juga terdapat di RIPKD Kabupaten Gresik 2013-2025 pasal 47 mengenai kriteria desa wisata yaitu mengembangkan sikap kewirausahaan masyarakat desa. Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mendukung terlaksananya program desa wisata. Berdasarkan data di lapangan, kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Hendrosari sudah baik dan dapat melaksanakan program desa wisata dengan baik juga. Terbukti dengan adanya wahana wisata yang terus berkembang dan olahan produk siwalan yang terus berkembang.

#### b. Sumber Daya Biaya

Sumber daya biaya merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan program desa wisata. Modal awal berdirinya program desa wisata di Desa Hendrosari yaitu berasal dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT) melalui Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) 2019 sebesar Rp. 1,3 Milyar yang seluruhnya digunakan untuk membangun fasilitas pariwisata. Ditambah dengan Dana Desa sebesar Rp. 300 juta dan Kas BUMDes sebesar Rp. 50 juta. Biaya pengelolaan berasal dari tiket masuk wisata. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa Hendrosari selalu memberikan transparansi anggaran atau keterbukaan mengenai pengelolaan keuangan wisata. Keterbukaan dilakukan dengan memasang banner tentang pengelolaan keuangan dan bertujuan agar masyarakat setempat mengetahui pengelolaannya. Masyarakat juga sudah merasakan hasil dari adanya program desa wisata, tetapi tidak semuanya. Hal ini dikarenakan yang menjadi sasaran untuk wisata ini merupakan orang yang belum mempunyai pekerjaan, orang yang tidak mampu dan remaja Desa Hendrosari. Sistem bagi hasil hanya dirasakan untuk warga yang bekerja di bidang pariwisata, dan sisanya digunakan untuk pengelolaan. Akibatnya tidak semua merasakan hasil dari desa wisata secara merata sehingga menyebabkan sumber daya biaya masih kurang baik pengelolaannya untuk Desa Wisata Hendrosari.

#### c. Sumber Daya Pemasaran

Pemasaran merupakan salah satu faktor dapat terlaksananya desa wisata. Tanpa adanya pemasaran, maka program desa wisata di Desa

Hendrosari juga tidak akan terlaksana dengan baik. Pemasaran sudah dilakukan oleh pemerintah, BUMDes maupun masyarakat setempat. Baik melalui mulut ke mulut dan juga sosial media. Dengan adanya pemasaran wisata ini, Desa wisata di Hendrosari semakin terkenal dan diketahui oleh masyarakat luas. Terbukti dengan banyaknya pengunjung yang datang ke tempat wisata, bahkan pada saat akhir pekan bisa mencapai 3000-4000 pengunjung. Ini membuktikan bahwa pemasaran yang dilakukan oleh pemerintah, BUMDes dan masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh DISPARBUD Kabupaten Gresik mengenai promosi yang dilakukan desa wisata dalam mendatangkan wisatawan.

#### d. Sumber Daya Peralatan

Peralatan bisa dikaitkan dengan fasilitas yang ada di kawasan wisata. Berdasarkan penelitian di lapangan, fasilitas yang ada sudah baik dan layak tetapi beberapa belum memenuhi persyaratan fasilitas pendukung yang sudah ditetapkan oleh DISPARBUD Kabupaten Gresik. Toko Cinderamata sudah ada, tetapi hanya sedikit dan belum menampung semua pedagang yang ada. Sehingga banyak UKM yang mendirikan kios seadanya didepan kawasan wisata. Hal ini dikarenakan keterbatasan biaya untuk membangun kios-kios UKM yang semakin banyak. Rencananya akan dibangun tempat khusus untuk UKM yang ada dan disediakan tempat parkir untuk pengunjung UKM. Kemudian penginapan/Homestay juga belum tersedia. Pusat Informasi Pariwisata yang juga sangat dibutuhkan oleh wisatawan juga belum ada di kawasan wisata Desa Hendrosari. Dijelaskan didalam RIPKD Kabupaten Gresik 2013-2025 tentang rencana desa wisata pasal 47 mengenai kriteria desa wisata yaitu adanya penyediaan fasilitas yang dimiliki oleh masyarakat lokal untuk peningkatan pendapatan masyarakat setempat. Penyediaan fasilitas yang dimiliki oleh masyarakat lokal yaitu dapat berupa penginapan, tempat pertunjukan, atau tujuan wisata. Tetapi tidak semua fasilitas tersebut ada di Desa Hendrosari. Tujuan wisata yang melibatkan masyarakat setempat juga belum ada, seperti pertunjukan budaya atau lainnya. Tetapi, untuk fasilitas pendukung yang lain seperti rumah makan, toilet, musholla, area parkir, balai pertemuan, tempat sampah, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, dan sarana pendukung seperti taman, wahana, dan lain-lain sudah memenuhi standar sebagai tempat wisata. Masyarakat juga merasa penyediaan fasilitas di kawasan wisata sudah baik. Jadi, sumber daya peralatan atau penyediaan fasilitas di Desa

Wisata Hendrosari cukup baik tetapi kurang lengkap jika disesuaikan dengan kriteria desa wisata menurut RIPKD Kabupaten Gresik 2013-2025 tentang desa wisata.

#### e. Sumber Daya Metode

Metode atau upaya pemerintah setempat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu dengan melibatkan masyarakat pada pelaksanaan program desa wisata. Berdasarkan penelitian di lapangan, sudah banyak masyarakat yang terlibat. Dari sebelumnya dia belum mempunyai pekerjaan menjadi mempunyai pekerjaan yang layak. Banyak masyarakat yang membuka usaha dan menjadi pegawai di kawasan wisata. Upaya pemerintah sudah berhasil dan masyarakat juga berupaya untuk menjaga eksistensi kawasan wisata dengan ikut menjaga dan merawat lingkungan sekitar.

Jadi, Sumber daya untuk pelaksanaan Desa Wisata sudah cukup baik. Sumber daya manusianya juga sudah sering mengikuti sosialisasi dan pelatihan, serta masyarakat dilibatkan dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya. Sumber daya pemasaran juga sudah baik dan sesuai dengan apa yang tertera di persyaratan desa wisata menurut DISPARBUD Kabupaten Gresik yaitu melalui internet. Sumber daya peralatan juga sudah cukup baik namun terdapat beberapa fasilitas yang belum ada dan terpenuhi sesuai persyaratan dari DISPARBUD Kabupaten Gresik. Kemudian sumber daya metode juga sudah sesuai dengan RIPKD Kabupaten Gresik 2013-2025 pasal 47 mengenai upaya pemerintah mendirikan desa wisata adalah untuk peningkatan pendapatan masyarakat setempat;

### 3. Karakteristik agen pelaksana

Masing-masing badan pelaksana program mempunyai peran masing-masing dan akan berpengaruh pada pelaksanaan programnya. Peran DISPARBUD Kabupaten Gresik sudah cocok dan sesuai. DISPARBUD Kabupaten Gresik selalu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program desa wisata di Desa Hendrosari secara berkala. Begitupun Pemerintah Desa Hendrosari selalu memonitoring dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program desa wisata yang dikelola oleh BUMDes Hendrosari. Sedangkan BUMDes mengelola kawasan wisata baik manajemennya, operasional, laporan biaya dan lain sebagainya. Sesuai penelitian di lapangan, masing-masing badan tersebut sudah menjalankan perannya dengan baik, terbukti masyarakat juga mengetahui peran masing-masing badan tersebut. Sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn, peran dan kinerja para

badan pelaksana tersebut sangat berpengaruh terhadap implementasi program desa wisata di Desa Hendrosari.

#### 4. Sikap/Kecenderungan Pelaksana

Sikap/kecenderungan para pelaksana dalam implementasi kebijakan mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Hal ini dikarenakan para pelaksana lah yang merumuskan kebijakan dan bukan warga atau masyarakat. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan tersendiri dalam melakukan tugasnya masing-masing. Pemerintah daerah cenderung melakukan pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat desa wisata. pembinaan tersebut dilakukan melalui sosialisasi dan juga pelatihan-pelatihan agar masyarakat lebih produktif. Sedangkan pemerintah desa cenderung kepada BUMDes untuk melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaannya. Selain itu, pemerintah desa juga mengurus masalah laporan keuangan desa wisata. Pemerintah juga cenderung terbuka dan mau menerima kritik dan saran dari masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa pelaksana cenderung melaksanakan program ini dengan baik.

#### 5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksanaan

Komunikasi antar organisasi pelaksana berjalan sangat baik. DISPARBUD Kabupaten Gresik selalu menjalin komunikasi kepada Pemerintah Desa Hendrosari, begitupun juga pemerintah Desa Hendrosari kepada DISPARBUD Kabupaten Gresik. Semua yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan wisata selalu dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan baik. Selain dengan DISPARBUD Kabupaten Gresik, Pemerintah Desa Hendrosari juga selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan BUMDes mengenai pelaksanaan program desa wisata dan BUMDes juga melakukan hal yang sama. Masyarakat juga selalu diberikan kesempatan terlibat dalam pengembangan kawasan wisata, dan diberikan kesempatan untuk dapat memberikan kritik dan saran kapan pun. Aktivitas pelaksanaan terdapat hambatan, yaitu pada awal pelaksanaan masyarakat ada beberapa yang tidak setuju dan juga terdapat anak-anak muda yang tidak setuju. Tetapi pemerintah dapat menyelesaikan itu dengan cara menjalin komunikasi yang baik dan melakukan pendekatan dengan masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn bahwa komunikasi yang terjalin antar organisasi maupun komunikasi antar aktivitas pelaksana, merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik, semakin baik komunikasi yang terjalin maka semakin kecil kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam suatu proses implementasi.

#### 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik

Kebijakan yang diberikan oleh pemerintah sangat mendukung terhadap pelaksanaan program desa wisata. Terbukti dengan program desa wisata ini dapat terlaksana dengan baik tanpa ada tantangan yang berarti. Selain itu, DISPARBUD Kabupaten Gresik dan DPMD kabupaten Gresik sangat mendukung pelaksanaan program tersebut. Seperti pada saat masa pandemi covid-19, DISPARBUD Kabupaten Gresik bersama Pemerintah Desa Hendrosari melakukan pembukaan wisata dalam era *new normal* dengan mewujudkan wisata yang memenuhi protokol kesehatan, seperti terdapat area cuci tangan, penyemprotan disinfektan, cek suhu dan arahan *social distancing*. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial yang adaptif dan peka terhadap keadaan. Selain itu perekonomian masyarakat yang menjadi sasaran program desa wisata yang dikelola BUMDes mengalami perubahan menjadi lebih baik dan sejahtera, yaitu masyarakat yang tidak mampu, masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan, dan remaja Desa Hendrosari agar lebih produktif. Tetapi dampak peningkatan ekonomi di lingkungan masyarakat belum merata, sehingga hanya beberapa saja yang merasakan dampaknya. Kondisi perekonomian jika dibandingkan dengan sebelum adanya desa wisata saat ini sudah lebih baik dan masyarakat juga lebih produktif. Banyak masyarakat yang membuka usaha dengan memanfaatkan potensi yang ada, seperti mengolah produk dari siwalan yang sebelumnya hanya diolah menjadi legen dan tuak, sekarang sudah banyak inovasi baru. Kemudian terdapat waduk yang dulunya hanya digunakan untuk tempat memancing, sekarang digunakan untuk wahana permainan air yang lebih menguntungkan. Inovasi-inovasi tersebut menjadikan perekonomian masyarakat meningkat dan Pendapatan Asli Desa juga meningkat.